

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, N. S. dan. (2017). Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(3). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i3.59274>
- Eulerich, M., & Lenz, R. (2020). *Defining , Measuring , and Communicating the Value of Internal Audit Best Practices for the Profession*. Internal Audit Foundation.
- Hartono, T. (2006). *Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang (Studi Kasus Pada Bank BTN)*.
- Herlinda, & Damis, S. (2025). Pemanfaatan Matrik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Pendidikan*, 2(3).
- Ilham, T., & Velianto, A. U. (2022). Belajar Dari Yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 48(1). <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2556>
- International Organization of Supreme Audit Institutions. (2022). *Applying the Three Lines Model In the Public Sector*.
- Jhon, W., & Creswell. (2015). Penelitian Kualitatif & Desain Riset. *Mycological Research*, 94(3), 522.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (2024). *Inspektorat Kemenko PMK Perkuat Integrasi Pengawasan Pengarusutamaan Gender*. Kemenko PMK. <https://www.kemenkopmk.go.id/inspektorat-kemenko-pmk-perkuat-integrasi-pengawasan-pengarusutamaan-gender>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional*. 5(3), 248–253.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah*. Nomor 4 Tahun 2014.
- Miles, M. B., & Michael, A. H. (1994). Qualitative Data Analysis. In *Proceedings of the National Academy of Sciences*. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2000). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*.

- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*.
- Prasetyo, B. (2012). *Metode penelitian kuantitatif*.
- Rai, I. G. A. (2008). *Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus*. Penerbit Salemba.
- Riyanto. (2022). *Prasyarat Implementasi PUG Kementerian Keuangan - Aspek Organisasi*. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/prasyarat-implementasi-pug-kementerian-keuangan-aspek-organisasi-6b629fe0/detail/>
- Rondonuwu, A. O., Masonoh, H., & Wokas, H. R. N. (2022). Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 13(2).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Method For Business : A Skill Building Approach* (J. W. & Sons (Ed.); 7th ed.).
- Setyawan, D., Firdausi, F., & Rusmiwari, S. (2018). Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1). <https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.2275>
- Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Refika Aditama.
- Soleha, S., & Afriyanni, A. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kota Pekanbaru. *Sorot*, 16(2). <https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.71-84>
- Susiana, S. (2015). Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(1).
- Wajdi, F., Seplyana, D., Juliastuti, Rumahlewang, E., Fatchiatuzahro, Halisa, N. N., Rusmalinda, S., Kristiana, R., Niam, M. F., Purwanti, E. W., Melinasari, S., & Kusumaningrum, R. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2). https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=YOhOEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA61&ots=c8rYl0YXJS&sig=WDE02kg_a8Ji-MH7KL-433O2efY
- Walikota Padang. (2020). *Peraturan Walikota Padang Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah*.
- Walikota Padang. (2024). *Keputusan Wali Kota Padang Nomor 373 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender*.

Wongkar, B. C., LIANDO, D., & KAWUNG, E. (2019). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di dinas perindustrian dan perdagangan daerah provinsi sulawesi utara dalam program pengembangan industri kecil dan menengah tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(86).

